

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.454.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.500.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	14.500.000	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.839.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	5.818.714.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	80.325.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	41.000.000	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	160.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	147.500.000	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.400.000	
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	325.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	300.000.000	
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	170.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	87.500.000	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Unit	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Unit	1.800.000	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.318.53100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	13.642.000.000	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	321.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	293.897.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Laporan	203.496.000	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	600.000.000	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	31.700.000	
22.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	92 unit	65.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	92 unit	60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.900.000.000	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.973.280.000	
24.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	38 Dokumen	500.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	38 Dokumen	854.000.000	
25.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 unit	790.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 unit	2.058.700.000	
26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9 unit	1.214.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9 unit	1.214.000.000	
27.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	122 Unit	300.000.000	
28.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	12 Unit	50.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	12 Unit	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1 dokumen	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1	30.000.000	
30.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	640.000.000	
31.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 laporan	25.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 laporan	132.010.000	
32.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3014 unit	170.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3014 unit	103.420.000	
33.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	4000 dokumen	104.000.000	Pemeliharaan Sarana dan	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian	4000 dokumen	105.270.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
34.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 unit	15.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 unit	15.000.000	
35.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	32.000.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	34.269.000	
36.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	40.000.000	
37.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	440.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	640.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	15.000.000	
39.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	40.000.000	
40.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	46.000.000	
42.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	25.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	15.000.000	

SUSUNAN PPKom DAN PEJABAT PENGADAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPKom	PEJABAT PENGADAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
15	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
16	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
17	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
22	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
23	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	NOVA TRI HARTANTO, A.Md.
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
24	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dinas Perhubungan)	M. ROFIKIN, SM.	BAG. PBJ dan MINBANG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197503051998031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TANGGAL : 05 Januari 2026
NOMOR : 500.11/2/2026

SUSUNAN PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (KASIR KEGIATAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	PPTK	KASIR KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.469.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	3.741.000	M. ROFIKIN, SM.	VENI OMI HARTINI, S.Tr.Tra.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perhubungan)	1.763.000	M. ROFIKIN, SM.	VENI OMI HARTINI, S.Tr.Tra.
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	6.965.000	M. ROFIKIN, SM.	ARIQ HASNA SALSABILA, S.E.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.008.912.000		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	4.007.278.000	M. ROFIKIN, SM.	VENI OMI HARTINI, S.Tr.Tra.
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perhubungan)	1.634.000	M. ROFIKIN, SM.	VENI OMI HARTINI, S.Tr.Tra.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.319.000		
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perhubungan)	12.319.000	M. ROFIKIN, SM.	ARIQ HASNA SALSABILA, S.E.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.937.000		
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	10.224.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perhubungan)	11.870.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	181.227.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	59.458.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	76.158.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	LUKY DIAN INDRAWATI, S.Kom
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.095.555.000		
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	1.920.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	342.194.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	2.751.441.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.215.000		
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	285.166.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	60.059.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	22.990.000	NI MATUN NAZILAH, S.H.	MOH. ADI TRI ALDI, A.Md.Tra.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	504.641.000		
18	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	30.000.000	ENDANG KOSTAMAN, A.Ma.PKB, S.H.	IRZA LAZUARDI YUSUF, S.S.T, M.H
19	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	474.641.000	ENDANG KOSTAMAN, A.Ma.PKB, S.H.	IRZA LAZUARDI YUSUF, S.S.T, M.H
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.161.823.000		
20	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	249.325.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	HERU WIAJI, A.Md.
21	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan)	848.819.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	SUROTO
22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	11.063.679.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	NOVA TRI HARTANTO, A.Md.
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	55.687.000		
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	55.687.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	HARI PUTRA SETIAWAN,A.Ma PKB, S.S.T.
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	41.100.000		
24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	27.900.000	ENDANG KOSTAMAN, A.Ma.PKB, S.H.	ANA EKO YEKTI,A.Ma.PKB,S.H.
25	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.200.000	ENDANG KOSTAMAN, A.Ma.PKB, S.H.	ANA EKO YEKTI,A.Ma.PKB,S.H.
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	149.503.000		
26	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	149.503.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	NOVA TRI HARTANTO, A.Md.
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	9.252.000		
27	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dinas Perhubungan)	9.252.000	SUGENG HARDI WIDIYANTO, S.E , M.A.P	SEPTIANA NURVITA HERDIYANTI, S.S.T.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD KESIU HIDAYAT, S.SiT.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197503051998031005

SUSUNAN PEJABAT /TIM TEKNIS DAN PENGAWAS LAPANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PJ TEKNIS	PENGAWAS LAPANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
I	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)		
1	Jasa Perencanaan / DED Pengadaan PJU dan Meterisasi Se-Kota Pekalongan	Zuhdi Tama Adiharto	–
2	Jasa Konsultansi PJU Abonemen 2 Kecamatan	Bram Aditya Matra	–
3	Jasa Pengawasan/supervisi Pengadaan PJU dan Meterisasi Se-Kota Pekalongan	Suroto	–
4	Pengadaan PJU Pringlangu Gg. 6B Pringrejo Kota Pekalongan	Bambang Supriyono	–
5	Pengadaan PJU RT.03 RW.08 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur	Eko Wahyono	–
6	Pengadaan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan RT.02 RW.16 Kel. Pringrejo	Bram Aditya Matra	–
7	Pengadaan PJU RT.08 RW.10 Kelurahan Jenggot	Suroto	–
8	Pengadaan PJU RT.01 RW.05 Kel. Podosugih	Zuhdi Tama Adiharto	–
II	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		
1	Pengadaan Lampu LED	Heru Wiaji, A.Md	–

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197503051998031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TANGGAL : 05 Januari 2026
NOMOR : 500.11/3/2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN TA. 2026

NO	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	ISKANDAR, SH, M.Hum	19690525 199003 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas

Pekalongan, 05 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197503051998031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
TANGGAL : 05 Januari 2026
NOMOR : 500.11/2/2026

SUSUNAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN, PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS GAJI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN TA. 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	SETYA KURNIA MAHARDIKA, A.MA.PKB	Kasir Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	Staf Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
2	ANNISATUN NUR IZZA MUSTAFA,S.S.T	Kasir Penerimaan Retribusi Parkir	Staf Unit Parkir
3	NANI WIDIANTI, SE	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
4	M. ARYO PANGESTU, A.Md.Kom	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Staf Subbag Renval dan Keuangan
5	VENI OMI HARTINI, S.Tr. Tra	Pengurus Gaji	Staf Subbag Renval dan Keuangan

Pekalongan, 05 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197503051998031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna mengarahkan program dan kegiatan pemerintah daerah agar sesuai dengan tujuan pembangunan dan visi daerah. Pentingnya dokumen perencanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah akan digunakan untuk perencanaan yang berisi panduan pelaksanaan kegiatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan dilingkungan SKPD.

b. Tujuan

Tujuan spesifik dari penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

- Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, atau dokumen terkait perencanaan kegiatan..

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 3.741.000,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah secara umum adalah

**FASILITAS
PENUNJANG**

penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran. di Kota
Pekalongan

b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

: Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah direncanakan akan dilaksanakan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

**8. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan
kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTO HIDAYAT, S.SiT, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna menjelaskan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Evaluasi dilakukan seperti untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari evaluasi kinerja perangkat daerah mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah terhadap sasaran strategis dan tujuan yang telah dirumuskan.

b. Tujuan

Tujuan spesifik dari evaluasi kinerja perangkat daerah adalah :
Identifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. TARGET/ SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam evaluasi kinerja perangkat daerah adalah peningkatan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah :

K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 12.076.000,- (Dua belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah secara umum adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, ketaatan pada aturan pengelolaan keuangan secara transparansi, akuntabilitas di Kota Pekalongan.

b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu evaluasi RKPD, monev SPIP, dokumen LKjIP, LKPD, LKPj dan SAKIP OPD.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	:	Administrasi Keuangan Prangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. LATAR BELAKANG	:	Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	:	a. Maksud Maksud dari koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan. b. Tujuan Tujuan spesifik dari koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah : - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. - Memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan laporan keuangan. - Mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan.
3. TARGET/ SASARAN	:	Target/sasaran yang ingin dicapai dalam koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	:	Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan penatausahaan serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah: • K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan • SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan • PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 1.634.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG	:	a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara umum adalah penyusunan laporan operasional, laporan perubahan, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, pelaporan aset tetap, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan,

koordinasi dengan bagian terkait seperti bendahara, bidang anggaran, dan pengadaan barang/jasa di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai peraturan.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 1. LATAR BELAKANG** : Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna mengarahkan program dan kegiatan pemerintah daerah agar sesuai dengan tujuan pembangunan dan visi daerah. Pentingnya dokumen perencanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD akan digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan strategis dan tahunan perangkat daerah yang komprehensif dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan spesifik dari koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah :

- Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, atau dokumen terkait perencanaan pembangunan.
- Analisis kondisi dan kebutuhan perangkat daerah untuk menyusun rencana kegiatan yang realistis dan sesuai dengan anggaran.
- Penggunaan indikator kinerja utama dan sasaran pembangunan sebagai alat pengukuran capaian program.

- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan.

- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 1.763.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran. di Kota Pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen RKA dan perubahan RKA.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTO HADAYAT, S.SiT, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1. LATAR BELAKANG :** Latar belakang pemberian surat teguran kepada pemilik kendaraan wajib uji yang terlambat melaksanakan uji berkala umumnya didasarkan pada aspek keselamatan, kepatuhan hukum, dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan di jalan. Banyak pemilik kendaraan angkutan (truk, bus, pikap) lalai atau sengaja menunda uji karena alasan ekonomi, waktu, atau ketidaktahuan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan tidak layak jalan.

Efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap kendaraan operasional di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya:

Pasal 53: Mengatur bahwa kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang wajib dilakukan uji berkala.

Pasal 55 ayat (1): Uji berkala kendaraan dilakukan untuk menjamin bahwa kendaraan tersebut layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 76: Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatur tata cara, jangka waktu, dan sanksi terhadap keterlambatan uji.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN :** a. Maksud

Maksud dari sub Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah untuk melakukan peneguran kepada pemilik kendaraan wajib uji yang telat melaksanakan uji di Kota Pekalongan

b. Tujuan

- Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pemilik Kendaraan
- Menjamin Keselamatan Lalu Lintas Kendaraan yang tidak diuji secara berkala berisiko mengalami gangguan teknis di jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan lain.
- Mencegah Kerusakan Lingkungan

Kendaraan yang tidak lolos uji emisi dapat menyumbang polusi udara. Uji berkala adalah bagian dari pengendalian emisi.

- Teguran merupakan bagian dari tahapan penegakan sanksi administratif sebelum dikenakan denda, pembekuan izin, atau tilang.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target / sasaran nya pemilik kendaraan wajib uji kota pekalongan
4. **NAMA ORGANISASI : PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : Muhammad Restu Hidayat, S.SiT.,M.T.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan wajib uji kota pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

8. **KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

: Keluaran/produk berupa koordinasi peneguran kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji selama 4 (empat) bulan.

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- SUB KEGIATAN** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan
-
- 1. LATAR BELAKANG** : Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari penyediaan gaji dan tunjangan akan digunakan untuk perencanaan yang berisi panduan pelaksanaan gaji atau honor pegawai ASN Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
- b. Tujuan
- Tujuan spesifik dari penyediaan gaji dan tunjangan adalah :
- Melaksanakan kewajiban gaji dan tunjangan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
 - Menjalankan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan pemerintah.
- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan gaji dan tunjangan pegawai ASN Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan penatausahaan serta Penyediaan Gaji dan Tunjangan dilingkungan SKPD adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.Si, M.T
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
- APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
- Rp. 4.363.005.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Juta Enam Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah)
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran. di Kota Pekalongan
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan.

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Pekalongan, kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa materai dan perangko merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan materai dan perangko diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa terkirimnya surat yang efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang peruntukkannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
- Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- Untuk kebutuhan administrasi dan operasional Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah peningkatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi perkantoran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.

5. SUMBER DANA DAN : a. Sumber Dana :

PERKIRAAN BIAYA

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 2.170.000,00,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

6.

RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

:

a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran. di Kota Pekalongan

b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7.

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

:

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
10.

KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN

:

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Pekalongan,kebutuhan kerja yang berupa kebersihan fasilitas kerja merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.

Penyediaan jasa kebersihan diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan yang efisien.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

: a. Maksud

Maksud dari pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan adalah :

 - Mewujudkan keindahan dan kebersihan bagi pengguna jasa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pemeliharaan lingkungan gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - Terasilitasinya kebutuhanjasa kebersihan untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - Untuk kebutuhan operasional Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah meningkatnya kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah :

 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

: a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 347.481.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

6.

RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

:

a.

Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran

b.

Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
7.

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
- :
- Jangka waktu pelaksanaan pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8.

KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN
- :
- Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Pekalongan. Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

: a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang peruntukannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah :

 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
 - Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Untuk kebutuhan administrasi dan operasional Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan jasa alat tulis kantor adalah meningkatnya layanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah :

 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

: a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN,

: a. Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran.

FASILITAS PENUNJANG	b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama layanan perkantoran Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kebutuhan akan penyediaan peralatan dan bahan kerja yang berupa peralatan rumah tangga merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan perlu disediakan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya bahan kerja berupa pelatan rumah tangga yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

:

a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga yang peruntukannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah :

 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
 - Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - Untuk kebutuhan operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah meningkatnya layanan publik serta layanan perkantoran Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

:

a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 14.730.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
6. RUANG LINGKUP,

: a. Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola

- LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG**

kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
7.

**JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

:

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8.

**KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

:

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama informasi yang mendukung layanan administrasi perkantoran Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kebutuhan akan penyediaan bahan informasi yang berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan perlu disediakan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya bahan informasi berupa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

: a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang peruntukannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
 - Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang informasi kegiatan Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah meningkatnya layanan publik serta layanan perkantoran Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

: a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP,

: a. Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola

- LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG**

kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran
- b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
7.

**JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

:

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8.

**KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

:

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik terutama layanan aparatur Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kebutuhan akan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi.
Penyediaan makanan dan minuman aparatur Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan perlu disediakan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

:

a. Maksud
Maksud dari pengadaan kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah untuk aparatur Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang peruntukannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah adalah :
 - Tercukupinya kebutuhan pembiayaan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan.
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur setelah mengikuti rapat-rapat koordinasi.
3. TARGET/ SASARAN

: Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah adalah meningkatnya layanan publik serta layanan perkantoran Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

:

a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 96.582.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI

: a. Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar

- PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

daerah secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

: Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN

: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah adalah terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. LATAR BELAKANG	: Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sarana dan prasarana gedung kantor sebagai aset milik daerah memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik. Gedung kantor yang terawat dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, seiring waktu penggunaan, kondisi gedung kantor mengalami penurunan fungsi dan kualitas, baik dari segi struktur, arsitektur, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya agar dapat terus dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	: a. Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya guna menjaga kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan fungsi gedung sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah. b. Tujuan • Menjamin keberlanjutan fungsi gedung kantor/bangunan lainnya dalam mendukung aktivitas pelayanan pemerintahan. • Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kerja aparatur. • Memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana gedung kantor. • Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
3. TARGET/ SASARAN	: Tercapainya kondisi gedung kantor yang layak, aman, dan nyaman digunakan dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah : • K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan • SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan • PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	: a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 45.980.000 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

6.

RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

:

a.

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya mencakup:
 - Pemeliharaan fasilitas penunjang
 - Perbaikan lain sesuai kebutuhan lapangan.

b.

Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

7.

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

:

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor direncanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan dalam Tahun Anggaran 2026

8.

KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN

:

Sarana dan Prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dalam kondisi baik, layak fungsi, dan aman digunakan., Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. LATAR BELAKANG : Barang Milik Daerah berupa gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Gedung yang terawat dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan gedung kantor dan bangunan lainnya tentu mengalami penurunan fungsi maupun kualitas, baik dari sisi struktur, estetika, maupun fasilitas penunjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan/rehabilitasi secara rutin dan terencana, agar barang milik daerah tetap berfungsi optimal, memiliki usia pakai lebih lama, serta memberikan manfaat yang maksimal dalam menunjang urusan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lainnya agar tetap terjaga kelayakan, kenyamanan, serta keamanan penggunaannya.
b. Tujuan

- Menjamin terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor secara optimal.
- Menyediakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan nyaman bagi aparatur.
- Memperpanjang usia pakai dan meningkatkan kualitas aset daerah.
- Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. TARGET/ SASARAN : Terwujudnya kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terawat, fungsional, dan representative dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

6. RUANG LINGKUP, : Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:

**LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG**

- Pengecatan gedung dan perbaikan estetika bangunan.
- Perbaikan atap, dinding, lantai, dan plafon.
- Perawatan instalasi listrik, air, serta jaringan pendukung.
- Perbaikan pintu, jendela, toilet, saluran air, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Pekerjaan rehabilitasi lainnya sesuai kebutuhan lapangan.

Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

7.

**JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

:

Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya direncanakan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2026.
8.

**KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

:

Gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik, aman, dan layak fungsi. Sarana dan prasarana penunjang yang terawat sehingga menunjang kelancaran tugas pemerintahan daerah.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas merupakan sarana transportasi yang sangat penting. Kendaraan dinas tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi kedinasan, namun juga sebagai pendukung mobilitas aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring penggunaan, kendaraan dinas memerlukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala agar tetap dalam kondisi prima, aman, dan layak digunakan. Selain itu, kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap kewajiban hukum serta untuk menjaga ketertiban administrasi aset daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, serta pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas serta memastikan pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu sehingga kendaraan tetap dalam kondisi baik, aman, dan sah secara administrasi.

b. Tujuan

- Menjaga kondisi kendaraan dinas agar selalu siap digunakan dalam mendukung mobilitas kedinasan.
- Memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan peraturan.
- Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran tugas aparatur pemerintah.
- Mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas.

3. TARGET/ SASARAN : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala. Terbayarnya pajak kendaraan dinas tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kendaraan dinas dalam kondisi baik, layak pakai, serta sah secara administrasi untuk operasional kedinasan.

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

**PENGADAAN
BARANG**

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA

a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 340.850.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6. RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:

 - Pemeliharaan rutin kendaraan dinas (servis berkala, penggantian oli, perbaikan ringan, dsb).
 - Perbaikan kendaraan dinas apabila terjadi kerusakan.
 - Pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - Penyediaan jasa pendukung untuk kelancaran pemeliharaan kendaraan.

Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan unit kerja terkait yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/perorangan dinas
7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pembayaran pajak kendaraan dinas dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2026.
8. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN

Kendaraan dinas dalam kondisi baik, aman, dan siap operasional. Tertib administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan dinas. Optimalisasi fungsi kendaraan dinas dalam mendukung kelancaran tugas aparatur pemerintah daerah.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. LATAR BELAKANG

: Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan transparan, dibutuhkan sarana penunjang berupa jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Jasa komunikasi seperti telepon, internet, dan jaringan data menjadi sarana vital untuk menunjang kelancaran komunikasi internal maupun eksternal perangkat daerah. Sementara itu, ketersediaan sumber daya listrik dan air sangat diperlukan agar kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan lancar dan pelayanan publik tetap optimal.

Untuk itu, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik perlu direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya penunjang urusan pemerintahan daerah.
2. MAKSUD DAN TUJUAN

: a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan jasa komunikasi, air, dan listrik yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan

 - Menjamin ketersediaan sarana komunikasi, air, dan listrik di lingkungan kerja perangkat daerah.
 - Mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional perkantoran.
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah.
 - Memberikan pelayanan publik yang optimal dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.
3. TARGET/ SASARAN

: Tersedianya layanan komunikasi (telepon, internet, dan jaringan data) yang lancar dan stabil.

Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk operasional gedung kantor.

Tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk mendukung kegiatan perkantoran.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

: a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 370.348.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

6.

RUANG LINGKUP,

LOKASI

PEKERJAAN,

FASILITAS

PENUNJANG

:

Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:

•

Penyediaan jasa komunikasi (telepon, internet, dan jaringan data).

•

Penyediaan sumber daya listrik untuk operasional perkantoran.

•

Penyediaan sumber daya air bersih untuk kebutuhan kantor.

Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan unit kerja terkait.

7.

JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

:

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2026.

8.

KELUARAN/

PRODUK YANG

DIHASILKAN

:

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik secara berkesinambungan dan terselenggaranya kegiatan administrasi pemerintahan dengan lancar serta terjaminnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN

A square QR code with a small yellow and blue logo in the center, used for digital verification of the document.

M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan administrasi, dan kegiatan operasional di perangkat daerah, dibutuhkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Barang cetakan seperti formulir, blangko, kop surat, kartu identitas pegawai, serta dokumen administrasi lainnya merupakan kebutuhan rutin untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Selain itu, penggandaan dokumen juga menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kegiatan dinas, baik untuk kepentingan koordinasi, pelaporan, maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan secara terencana, efisien, dan berkesinambungan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional perangkat daerah.
b. Tujuan

- Memenuhi kebutuhan cetakan dokumen administrasi secara tepat waktu dan sesuai standar.
- Menyediakan layanan penggandaan dokumen yang efisien dan berkualitas.
- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- Menunjang ketersediaan sarana administrasi dalam pelayanan publik.

3. TARGET/ SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan dokumen penggandaan bagi perangkat daerah.

Meningkatnya kelancaran administrasi pemerintahan.

Tersedianya sarana administrasi yang efektif untuk pelayanan publik.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

BIAYA

- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 112.000.000 (Seratus Dua Belas Juta Rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**

: Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:

 - Penyediaan barang cetakan (formulir, blanko, kop surat, kartu identitas, banner, brosur, dan sejenisnya).
 - Penyediaan jasa penggandaan dokumen (fotokopi, print, dan penjiilidan).
 - Distribusi hasil cetakan/penggandaan kepada unit kerja terkait.

Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan unit kerja terkait.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

: Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2026.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN**

: Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen sesuai kebutuhan, dan terjaminnya kelancaran administrasi perangkat daerah serta meningkatnya efektivitas kerja aparatur melalui dukungan sarana cetak dan penggandaan yang memadai.

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. LATAR BELAKANG : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, dibutuhkan dukungan sarana logistik perkantoran. Bahan logistik kantor merupakan kebutuhan rutin yang digunakan oleh pegawai dalam rangka pelaksanaan administrasi, kegiatan operasional, serta pelayanan publik.

Ketersediaan bahan logistik kantor yang memadai akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja aparatur. Oleh karena itu, penyediaan bahan logistik kantor harus direncanakan secara baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional perangkat daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan bahan logistik kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional perangkat daerah.
b. Tujuan

- Memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi.
- Menjamin ketersediaan bahan logistik kantor tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintah.
- Mendukung kelancaran pelayanan publik melalui penyediaan sarana logistik yang memadai.

3. TARGET/ SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor secara rutin dan berkesinambungan.

Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi dan operasional perangkat daerah.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Tersedianya sarana pendukung kegiatan perkantoran yang efektif.
: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 298.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

6.

RUANG LINGKUP,

LOKASI

PEKERJAAN,

FASILITAS

PENUNJANG

: Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:
 - Penyediaan bahan logistik kantor untuk kegiatan administrasi.
 - Distribusi bahan logistik kepada unit kerja yang membutuhkan.
 - Pengelolaan dan pendataan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan.Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan unit kerja terkait.
7.

JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

: Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2026.
8.

KELUARAN/

PRODUK YANG

DIHASILKAN

: Tersedianya bahan logistik kantor sesuai kebutuhan dan terjaminnya kelancaran kegiatan administrasi perangkat daerah serta optimalisasi dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. LATAR BELAKANG : Instalasi listrik dan sistem penerangan gedung kantor merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Ketersediaan listrik dan penerangan yang memadai akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi aparatur pemerintah.

Seiring dengan intensitas penggunaan, komponen instalasi listrik maupun penerangan seperti kabel, saklar, stop kontak, lampu, panel listrik, dan perlengkapan lainnya dapat mengalami penurunan fungsi atau kerusakan. Hal ini tentu dapat mengganggu kegiatan operasional perkantoran.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor secara rutin dan terencana agar sistem kelistrikan dan penerangan tetap berfungsi optimal, aman, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor guna menjaga ketersediaan dan keberlanjutan fungsi sarana listrik dan penerangan di lingkungan perkantoran.

b. Tujuan

- Menjamin ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.
- Memastikan sistem listrik dan penerangan berfungsi dengan baik dan aman.
- Mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan publik.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui penyediaan komponen listrik/penerangan yang sesuai standar

3. TARGET/ SASARAN : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan kantor.

Lingkungan kerja yang terang, aman, dan nyaman bagi aparatur.

Terjaminnya kelancaran aktivitas perkantoran tanpa hambatan dari sisi kelistrikan dan penerangan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan penyediaan makanandan minuman adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

5. **SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG** : Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi meliputi:
- Penyediaan komponen instalasi listrik (kabel, saklar, stop kontak, MCB, panel listrik, dll).
 - Penyediaan komponen penerangan bangunan kantor (lampu, fitting, ballast, dll).
 - Perbaikan atau penggantian komponen listrik/penerangan yang rusak.
 - Dukungan teknis instalasi sesuai kebutuhan lapangan. Lokasi Pekerjaan : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan unit kerja terkait.
7. **JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN** : Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran / 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2026.
8. **KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN** : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan dan terjaminnya ketersediaan listrik dan penerangan di lingkungan kerja serta lingkungan kerja perkantoran yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. LATAR BELAKANG : Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor

b. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memastikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan

**4. NAMA ORGANISASI :
PENGADAAN
BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : Muhammad Restu Hidayat, S.SiT.,M.T.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 98.000.000,00,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di Kota Pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi serta Pemeliharaan Aplikasi SIM Pengujian Kendaraan Bermotor. Berikut alat uji yang dilakukan perawatan dan kalibrasi :
- Alat Uji Emisi Gas Buang
 - Alat Uji Axle Play Detector
 - Alat Uji Lampu
 - Alat Uji Kincup Roda
 - Alat Uji Berat Kendaraan
 - Alat Uji Rem
 - Alat Uji Speedometer

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1. LATAR BELAKANG** : Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Bagi kendaraan yang telah memenuhi kelaikan jalan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda bukti lulus uji.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah untuk sebagai tanda bukti lulus uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor

- b. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah terkendalinya kendaraan bermotor yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan

- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : Muhammad Restu Hidayat, S.SiT.,M.T.

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 53.000.000,00,- (Lima puluh tiga juta rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di Kota Pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Bukti Lulus Uji 2096 buah

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T.

NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan :
1. **LATAR BELAKANG** : menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah untuk penunjang kebutuhan kelengkapan keselamatan penguji kendaraan bermotor, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor

b. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memberikan penunjang kebutuhan kelengkapan keselamatan penguji kendaraan bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di jalan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
 3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah memastikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan
 4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : Muhammad Restu Hidayat, S.SiT.,M.T.
 5. **SUMBER DANA DAN** : a. Sumber Dana :

**PERKIRAAN
BIAYA**

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di Kota Pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Server Pengujian Kendaraan Bermotor Tipe Dell PowerEdge R250 Xeon E-2324G, 16GB, 2TB.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.Si.T., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkuta Jalan(LLAJ)
KEGIATAN	: Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

- 1. LATAR BELAKANG** : Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuat keputusan, baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun Pemerintah Pusat. Salah satu perkembangan dari tataguna lahan di perkotaan adalah adanya perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat-pusat kegiatan. Baik pusat kegiatan yang bersifat jasa komersial maupun pusat kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan suatu pusat kegiatan primer dalam wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan dilaksanakan. Perubahan struktur ruang kota akan berpengaruh kepada pola pergerakan yang pada akhirnya akan membebani jaringan jalan yang ada di suatu wilayah. Pembangunan pusat kegiatan dan pengembangan kawasan pusat kegiatan pada ruas jalan nasional dan akan didominasi oleh kegiatan dan jasa tertentu yang sudah pasti akan menimbulkan tarikan pergerakan baru yang cukup besar yang akan membebani jaringan jalan di wilayah perkotaan, tarikan pergerakan baru ini tidak saja berasal dari wilayah kota saja, tetapi juga dari luar wilayah kota. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah analisis pengaruh perkembangan tana guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas di sekitar, hal ini diakibatkan oleh timbulnya lalu lintas baru, lalu lintas beralih, dan oleh kendaraan yang keluar masuk dari atau ke suatu lahan. Andalalin mempunyai keragaman tergantung dari kondisi setempat dan kebijakan pemerintah. Andalalin dapat bersifat makroskopik sewaktu tahap pra kajian kelayakan pengembangan lahan, dengan fokus utama lebih diarahkan pada sistem transportasi makro, disamping itu juga dapat bersifat mikroskopik (terperinci). Kebijakan pengendalian dampak lalu lintas antara lain suatu usaha meminimalkan dampak lalu lintas seperti peningkatan kapasitas jalan dan pemasangan perlengkapan jalan.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
- a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin adalah menganalisis besaran dampak lalu lintas yang timbul akibat pembangunan pada tahap konstruksi dan tahap operasi, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap jaringan jalan yang ada di sekitar dapat diantisipasi.
 - b. Tujuan
 - Memperkirakan dampak yang diakibatkan dari pembangunan suatu pusat kegiatan baru.
 - Menentukan bentuk/perbaikan yang diperlukan guna mengakomodasi perubahan yang terjadi sebagai akibat perubahan dan pengembangan aktivitas tata guna lahan.

- Menyesuaikan dan menyelaraskan keputusan-keputusan tentang tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas dan jaringan jalan.
 - Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penanganan dampak lalu lintas.
3. **TARGET / SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin adalah mengkoordinasikan dengan pihak pengembang dan instansi terkait untuk meminimalkan dampak lalu lintas yang ditimbulkan terkait adanya pusat kegiatan baru.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I: Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAANNYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin adalah melakukan penilaian dan evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN).
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin adalah rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T

NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

1. LATAR BELAKANG : Salah satu tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kota Pekalongan. Demi tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya ke sinergian antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan terkait di Pekalongan baik dari segi tugas pokok maupun fungsi. Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Kota Pekalongan perlu membentuk wadah koordinasi dalam bentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah banyaknya permasalahan menyangkut fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi memerlukan upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Tujuan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara lintas kelembagaan.

4. **NAMA ORGANISASI** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan Pelaksanaan
PENGADAAN BARANG Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.
5. **SUMBER DANA DAN** : a. Sumber Dana :
PERKIRAAN BIAYA APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan
LOKASI PEKERJAAN, Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah kebijakan pemerintah kota
FASILITAS pekalongan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan demi
PENUNJANG terciptanya system transportasi perkotaan yang terpadu.
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan
PELAKSANAAN Jalan Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan selama 2 (dua) kali.
8. **KELUARAN/** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Forum
PRODUK YANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah kebijakan
DIHASILKAN pemerintah kota pekalongan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka memberikan layanan kepada pengguna jalan di wilayah Kota Pekalongan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2014 telah mengoperasikan perangkat ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Pekalongan dan pembangunannya berlanjut di tahun 2015. Untuk menjaga operasionalisasi fungsi sarana dan prasarana tersebut di atas, mutlak diperlukan kegiatan perawatan secara kontinyu, agar pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan dapat terjaga secara optimal, sehingga terlaksana kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah menjaga optimalisasi kinerja dan fungsi sarana dan prasarana lampu lalu lintas pada wilayah kerja ATCS Kota Pekalongan, sehingga pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dapat tetap berlangsung dengan baik khususnya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah terkendalinya pengamanan lalu lintas akan kemacetan dan meningkatnya kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan.
4. **NAMA ORGANISASI** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Pelaksanaan
PENGADAAN BARANG Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.
5. **SUMBER DANA DAN** : a. Sumber Dana :
PERKIRAAN BIAYA APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 475.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penataan
LOKASI PEKERJAAN, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
FASILITAS Kabupaten/Kota adalah pengaturan kelancaran arus lalu lintas di
PENUNJANG Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penataan Manajemen dan
PELAKSANAAN Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan

**PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah

- a. Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meningkatnya kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan;
- b. Terlaksananya operasional ATCS Kota Pekalongan selama satu tahun;
- c. Pengadaan UPS 11 unit

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Pendapatan asli daerah (PAD) adalah hasil dari optimalisasi daerah dalam memanfaatkan kekayaan daerahnya sendiri, maka PAD merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Misalnya retribusi parkir merupakan salah satu komponen penyumbang PAD. Memiliki potensi yang lebih untuk digali dan dikembangkan. Suatu permasalahan yang justru terjadi adalah perkembangan nilai retribusi parkir di kota Pekalongan yang "stagnan" atau tidak berkembang. Keadaan ini kemudian menimbulkan suatu dilema karena perkembangan pembangunan yang "notabene" memunculkan zona aktivitas perekonomian dan pariwisata tidak mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
- Untuk mengoperasionalkan penanganan masalah perparkiran di Kota Pekalongan diperlukan strategi yang lebih detail mencakup perencanaan dan program-program untuk menggali potensi dan dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat kota Pekalongan, sehingga diperlukan optimalisasi tentang potensi retribusi parkir yang merupakan sektor penyumbang PAD yang potensial.
- Dan menjaga parkir tepi jalan umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lain sehingga tercermin suatu kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN :**
- a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terealisasi dengan optimal..
- b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan lancar, serta pengoptimalisasian potensi pendapatan daerah yang ada.
- 3. TARGET/ SASARAN :** Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah tercapainya target yang telah ditetapkan serta terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG :** Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat, S.SiT., M.T.
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :**
- a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 298.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG :**
- a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah tercapainya target dan ketertiban perparkiran.
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

: Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

**8. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota berupa Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas..

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.

NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Keselamatan lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi, khususnya bagi pengemudi angkutan umum yang setiap hari mengemban tanggung jawab besar dalam melayani mobilitas masyarakat. Pengemudi bukan hanya mengendalikan kendaraan, tetapi juga memikul tanggung jawab atas keselamatan penumpang, pengguna jalan lain, serta kelancaran arus lalu lintas. Pengemudi angkutan umum memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya kedisiplinan, kurangnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas, serta perlunya peningkatan pelayanan prima kepada penumpang.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota adalah untuk membina, pengawasan dan pemilihan pengemudi angkutan umum teladan dalam Pelaksanaan Kebijakan PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Tujuan
- Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan kualitas, kedisiplinan, serta profesionalisme pengemudi dengan

menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama bagi pengemudi dalam peningkatan keselamatan pelayanan angkutan umum di Kota Pekalongan.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota adalah sopir/pengemudi/awak mudi angkutan umum di wilayah Kota Pekalongan
4. **NAMA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T
5. **SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,
LOKASI PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota adalah pemahaman, pengetahuan dan kompetensi bagi pengemudi angkutan umum yang berkeselamatan dan peningkatan keselamatan pelayanan angkutan umum di Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan yang telah disesuaikan dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan.

8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota adalah terpenuhinya pengetahuan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas, kedisiplinan, serta profesionalisme pengemudi untuk peningkatan keselamatan pelayanan angkutan umum di Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.

NIP. 9750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN** : Administrasi Keuangan Prangkat Daerah
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
-
- 1. LATAR BELAKANG** : Dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah terutama administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kota Pekalongan guna pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD akan digunakan untuk perencanaan yang berisi panduan pelaksanaan kegiatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan dilingkungan SKPD.
- b. Tujuan
- Tujuan spesifik dari pelaksanaan penatusahaan dan verifikasi keuangan adalah :
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
 - Menjalankan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan pemerintah.
 - Melaksanakan dengan tepat waktu dalam proses penatausahaan dan pengujian keuangan.
- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penatusahaan dan verifikasi keuangan adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan penatausahaan serta pengujian/verifikasi keuangan dilingkungan SKPD adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
- APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
- Rp. 84.296.000,- (Delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan verifikasi keuangan secara umum adalah penyediaan sarana pelayanan administrasi perkantoran. di Kota Pekalongan
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan verifikasi keuangan direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan verifikasi keuangan yaitu unput data aplikasi penatausahaan keuangan, pelaporan dan BMD.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESLI Hidayat, S.Si, M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pemakai sepeda, dan pengendara kendaraan lainnya, melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kecelakaan maupun kegiatan/ aksi kriminal. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah untuk mengurangi angka PJU Liar dan Abonemen serta menambah jumlah PJU meterisasi di wilayah Kota Pekalongan.
 - b. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah mengurangi ruas jalan di Kota Pekalongan yang belum ada penerangan jalannya.
- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah persentase peningkatan fasilitas prasarana jalan di Kota Pekalongan.

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat, S.SiT., M.T.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 912.660.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah peningkatan Penerangan Jalan di Kota Pekalongan.
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah meningkatnya jumlah ruas jalan yang dimeterisasi di Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Kondisi demografis wilayah mempunyai pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut, demikian juga dengan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada tata guna lahan yang berimplikasi terhadap pengembangan wilayah termasuk salah satunya adalah jalan. Untuk mengimbangi eksploitasi perubahan tata guna lahan maka perlu dilakukan pengembangan dari sistem transportasi itu sendiri, hal ini terkait dengan tingkat kemudahan pencapaian/ aksesibilitas menuju suatu wilayah. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, pengamanan pada saat lebaran, natal, dan tahun baru serta melakukan penjagaan keamanan pada pos perlintasan sebidang di Kota Pekalongan diperlukan agar terlaksana kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan. Untuk menjaga operasionalisasi fungsi sarana dan prasarana tersebut di atas, mutlak diperlukan kegiatan perawatan secara berlanjut, agar pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan dapat terjaga secara optimal.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah agar terlaksana kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekalongan serta menjaga optimalisasi kinerja dan fungsi sarana dan prasarana perlintasan sebidang.
- b. Tujuan
- Tujuan dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan dan menjaga keamanan perlintasan sebidang.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah terkendalinya pengamanan lalu lintas dengan meningkatnya kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan serta terjaganya keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat, S.SiT,M.T

5. **SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 2.892.995.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Kota Pekalongan serta empat pos perlintasan sebidang Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah
a. Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meningkatnya kinerja ruas jalan kota di Kota Pekalongan;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas dan kelengkapan dokumen perjalanan;
c. Terlaksananya operasional dan fasilitasi perlintasan sebidang;

- d. Terlaksananya pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dengan mengadakan giat Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT.,M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

1. LATAR BELAKANG : Sektor Transportasi Darat mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah sehingga keamanan, kelancaran dan keselamatan jalan menjadi tanggung jawab utama, termasuk diantaranya pemenuhan fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Pekalongan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota adalah untuk pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan sehingga pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dapat tetap berlangsung dengan baik khususnya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kinerja, kelancaran, serta keamanan pada ruas jalan di Kota Pekalongan

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota adalah memastikan terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota adalah :
• K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
• SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

• PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota berupa Perencanaan Marka Jalan, Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Cermin Tikungan.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M.RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- 1. LATAR BELAKANG** : Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas, Pemenuhan persediaan dalam memelihara fasilitas perlengkapan jalan tersebut menjadi tanggung jawab utama agar terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekalongan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam memelihara dan merehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan sehingga perlengkapan jalan di Kota Pekalongan dapat berfungsi dengan baik, serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dapat tetap berlangsung dengan baik.
 - b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah perlengkapan jalan di mas jalan Kota Pekalongan dapat berfungsi dengan baik.
- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah memastikan terpenuhi dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota adalah :

K/L/D/I	: Pemerintah Kota Pekalongan
SKPD	: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
PA	: M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 309.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Kejuaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan berupa Pemeliharaan lampu Traffic Light, lampu Flashing, serta rambu • rambu lalu lintas, dan Lampu Aspek Traffic Light.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU Hidayat, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

- 1. LATAR BELAKANG** : Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pemakai sepeda, dan pengendara kendaraan lainnya. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang memiliki umur pakai atau umur teknis, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun barang-barang penunjang PJU lainnya.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah untuk menjaga agar lampu PJU dapat berfungsi dengan baik dan optimal.
 - b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi para pengguna jalan.
- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah persentase peningkatan fasilitas prasarana jalan di Kota Pekalongan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat, S.SiT., M.T.

5. **SUMBER DANA** : a. Sumber Dana :
DAN PERKIRAAN APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
BIAYA
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 13.441.102.000,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP,** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Rehabilitasi dan
LOKASI Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah peningkatan Penerangan
PEKERJAAN, Jalan di Kota Pekalongan.
FASILITAS b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
PENUNJANG
7. **JANGKA WAKTU** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan
PELAKSANAAN Pemeliharaan Prasarana Jalan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan
PRODUK YANG Pembangunan Prasarana Jalan adalah meningkatnya fasilitas
DIHASILKAN prasarana Jalan serta meningkatnya jumlah LPJU hemat energi.

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTO HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1. LATAR BELAKANG : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) merupakan upaya strategis dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan yang ada agar lebih tertib, aman, dan efisien. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, permasalahan lalu lintas di tingkat kabupaten/kota seperti kemacetan, kecelakaan, dan penurunan kualitas lingkungan semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi pelaksanaan MRLL agar pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat memiliki pemahaman serta peran aktif dalam mendukung kebijakan pengelolaan lalu lintas. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan tercipta sinergi dalam penerapan berbagai langkah teknis, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, peningkatan fasilitas pendukung, hingga penerapan teknologi transportasi, sehingga jaringan jalan kabupaten/kota dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
dari kegiatan sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan MRLL dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di daerah. Dengan sosialisasi ini, diharapkan semua pihak memiliki persepsi yang sama, memahami konsep, serta mengetahui langkah-langkah strategis yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mendukung penerapan kebijakan MRLL. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya perilaku berlalu lintas yang tertib, mengurangi angka kecelakaan, mengoptimalkan kapasitas jalan yang ada, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang berkelanjutan guna menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan lalu lintas, meliputi pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, perangkat kecamatan dan kelurahan, pengelola transportasi umum, organisasi masyarakat, akademisi, hingga pengguna jalan. Dengan menyasar berbagai elemen tersebut, diharapkan tercipta pemahaman bersama, komitmen, serta partisipasi aktif dalam mendukung implementasi MRLL sehingga tujuan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas dapat tercapai secara optimal

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

**PENGADAAN
BARANG**

- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
- SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota berupa Pelaksanaan Sosialisasi terkait Lalu Lintas Tingkat Pelajar di Tingkat Kota, Pelaksanaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas serta tersedianya Ruang Literasi lalu lintas bagi PAUD dan TK .

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN	: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang strategis dan vital yang dilewati oleh Jalan Nasional (jalur pantura) serta dengan adanya akses keluar dari jalan tol yang sangat ramai dilewati oleh berbagai jenis kendaraan. Jalan Pantura serta akses keluar jalan tol menjadi akses dalam distribusi barang ataupun orang serta pariwisata. Situasi tersebut menyebabkan peningkatan volume lalu lintas di Kota Pekalongan sehingga berdampak terhadap terjadinya permasalahan lalu lintas antara lain kesemrawutan dan kepadatan lalu lintas serta terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan lalu lintas yang baik, pengaturan lalu lintas yang dimaksud adalah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2015 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Untuk mengetahui tingkat pelayanan suatu jalan yang ada di pekalongan, maka diperlukan laporan lalu lintas untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan di ruas jalan Kota Pekalongan.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
1. Melakukan pendataan dasar (database) volume lalu lintas diruas-ruas jalan utama di Kota Pekalongan.
 2. Mengetahui volume kendaraan yang melewati ruas jalan dari

berbagai jenis kendaraan yang lewat (kend.pribadi, kendaraan barang, bus, angkot, sepeda motor serta kendaraan tidak berrmotor).

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini Adalah untuk mengetahui kinerja ruas jalan utama di Kota Pekalongan.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan ini Adalah
1. Memberikan gambaran kondisi volume lalu lintas di Kota Pekalongan;
 2. Memberikan gambaran kondisi permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan;
 3. Mengevaluasi kondisi lalu lintas di Kota Pekalongan;
 4. Memberikan solusi perbaikan untuk peningkatan pelayanan jalan;
 5. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di sektor perhubungan;
4. **NAMA ORGANISASI : PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : M. Restu Hidayat S.SiT.,M.T.
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN,** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota adalah Pelaksanaan Survey Lalu Lintas di Beberapa Ruas Jalan Kota Pekalongan

**FASILITAS
PENUNJANG**

b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota berupa Dokumen Survey Lalu Lintas .

Pekalongan, September 2025

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

1. LATAR BELAKANG : Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Transportasi darat, khususnya angkutan umum, memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah. Namun demikian, tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum menjadi perhatian serius. Keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum. Sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan, Kementerian Perhubungan telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-AU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SMK-AU ini mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, serta praktik kerja yang berorientasi pada pencegahan kecelakaan dan peningkatan pelayanan. Implementasi SMK-AU di perusahaan angkutan umum masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman regulasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah untuk membina dan pengawasan Perusahaan Angkutan Umum dalam Pelaksanaan Kebijakan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 30 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan

Angkutan Umum adalah meningkatkan pemahaman dan pemenuhan kebijakan dalam PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 30 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum di Kota Pekalongan

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah pemilik/ pengurus/ pimpinan perusahaan angkutan umum di wilayah Kota Pekalongan
4. **NAMA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T
5. **SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 9.400.000,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI
PEKERJAAN, FASILITAS
PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah pemahaman dan pengetahuan terkait pemenuhan kelengkapan dokumen dan sistem keselamatan perusahaan angkutan umum di Kota Pekalongan.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan yang telah disesuaikan terjadwalkan.
8. **KELUARAN/ PRODUK
YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah terpenuhinya kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan

Umum dalam menunjang operasional dan keselamatan pelayanan angkutan umum di Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik. Ketersediaan angkutan orang maupun barang yang memadai di wilayah kabupaten/kota menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran mobilitas, efisiensi logistik, serta keterhubungan antarwilayah. ketersediaan angkutan umum sering menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan jumlah armada dengan kebutuhan, trayek yang tidak optimal, hingga kurangnya pengawasan terhadap operasional angkutan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa keterbatasan akses transportasi, meningkatnya biaya logistik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan yang sistematis agar ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu kabupaten/kota dapat terjamin, baik dari segi kuantitas, kualitas pelayanan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
- Maksud dari sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah sebagai upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang di wilayah Kota Pekalongan
- b. Tujuan
- Tujuan dari sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah menjamin ketersediaan angkutan umum yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan angkutan orang dan barang secara selamat, aman, tertib, dan nyaman, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi, menyediakan data dan informasi ketersediaan angkutan sebagai dasar perencanaan kebijakan transportasi serta peningkatan kesadaran dalam keselamatan berlalu lintas untuk angkutan umum.

- 3. TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah Moda Angkutan Umum (baik angkutan penumpang/barang bermotor dan tidak bermotor) Kota Pekalongan
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah :
- K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana : APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah meningkatnya pengetahuan dan informasi tentang keselamatan berlalu lintas bagi angkutan tidak bermotor di Kota Pekalongan
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.

8. KELUARAN/

**PRODUK YANG
DIHASILKAN**

: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah meningkatnya pengetahuan keselamatan berlalu lintas bagi angkutan tidak bermotor serta pemberian fasilitas perawatan armada angkutan tidak bermotor di Kota Pekalongan.

Pekalongan, September 2025



PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN

MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1. LATAR BELAKANG** : Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik. Ketersediaan angkutan orang maupun barang yang memadai di wilayah kabupaten/kota menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran mobilitas, efisiensi logistik, serta keterhubungan antarwilayah. ketersediaan angkutan umum sering menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan jumlah armada dengan kebutuhan, trayek yang tidak optimal, hingga kurangnya pengawasan terhadap operasional angkutan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa keterbatasan akses transportasi, meningkatnya biaya logistik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan yang sistematis agar ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu kabupaten/kota dapat terjamin, baik dari segi kuantitas, kualitas pelayanan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** :
- a. Maksud
Maksud dari sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah sebagai upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang di wilayah Kota Pekalongan
 - b. Tujuan
Tujuan dari sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah menjamin ketersediaan angkutan umum yang memadai

dan sesuai kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan angkutan orang dan barang secara selamat, aman, tertib, dan nyaman, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi, menyediakan data dan informasi ketersediaan angkutan sebagai dasar perencanaan kebijakan transportasi serta peningkatan kesadaran dalam keselamatan berlalu lintas untuk angkutan umum.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah Moda Angkutan Umum (baik angkutan penumpang/barang bermotor dan tidak bermotor) Kota Pekalongan
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah :
 - K/L/D/I : Pemerintah Kota Pekalongan
 - SKPD : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - PA : MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana :
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup / batasan lingkup sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah .Inventarisasi dan pendataan, pengendalian ketersediaan angkutan, pengawasan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan/dokumen dan rekomendasi angkutan umum.
b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan sub Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang

Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya laporan hasil pengawasan serta evaluasi berkala, rekomendasi kebijakan penataan angkutan, meningkatnya kepatuhan operator, dan terjaminnya pelayanan angkutan umum

Pekalongan, September 2025

PENGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 19750305 199803 1 005



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
Kode Pos 51122 Telp. (0285) 421600 Fax. (0285) 437108
Email : dishubpekalongan@gmail.com Website : dishub.pekalongankota.go.id

AGENDA KERJA PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN
BULAN JANUARI - FEBRUARI 2026

No.	Nama Kegiatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Ket.
1.	Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Mudik dan Balik Rantau Gratis Tahun 2026	Rabu, 07 Januari 2026 Jam 08.30 Tempat, Aula Rapat lantai 2 Gedung Grandhika Bhakti Praja	
2.	Undangan Pengarahan Kepada PPK dan Lurah Perihal Penyusunan Laporan Keungan SKPD TA 2025	Senin, 12 Januari 2026 Jam 09.00 Tempat, R. Aula Lantai 3 BPKAD	
3.	Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan/Modifikasi Jln. Ir-Sutami (Exit Tol Setono)	Rabu, 14 Januari 2026 Jam 08.00 Tempat, Ruang Abhiproya Lantai 1 Bapperida	
4.	Undangan Rapat Kerja Terkait Pembahasan Penonaktifan Shelter Pedagang Kaki Lima Jalan Cendrawasih Kota Pekalongan	Kamis, 15 Januari 2026 Jam 13.00 Tempat, R. Tiga Negeri Setda	
5.	Undangan 1. Pelatihan dan Pengambilan Sumpah, 2. Pengarahan Terkait Penanganan dan Pengurangan Sampah	Kamis, 15 Januari 2026 Jam 19.30 Tempat Aula Dinas Pendidikan	
6.	Undangan Festival Inklusi dan Launching Rumah Berdaya Bersama Gubernur Jawa Tengah	Sabtu, 31 Januari 2026 Jam 08.30 Tempat Gedung Bakorwil III Jawa Tengah	
7.	Undangan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Karawang	Senin, 2 Februari 2026 Jam 09.30 Tempat R, Rapat BPK Lantai 2 BPKAD	
8.	Undangan High Level meeting (HLM) TPID	Jum'at, 6 Februari 2026 Jam 08.30 Tempat R. Rapat Tiga Negeri Setda	
9.	Undangan Semarak Undian Tabungan 2026 PT BPR Bank Pekalongan (Perseroda)	Sabtu, 7 Februari 2026 Jam 08.00 Nirwana Hotel	
10.	Undangan Rakor ANEV Posko Terpadu Natal 2025 dan Persiapan Posko Terpadu Lebaran 2026	Rabu, 11 Februari 2026 Jam 13.00 Via Daring	

11.	Undangan Penguatan Kolaborasi Pengembangan Angkutan Aglomerti Perkotaan Melalui Pemanfaatan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor	Rabu, 11 Februari 2026 Jam 19.00 Tempat Ruangan Pertemuan The Kopeng Park Kab. Semarang	
12.	Undangan Kunjungan Kerja dan Pertandingan Persahabatan Tenis Tim OPD Kota Pekalongan dengan Tim OPD Kota Magelang	Kamis – Jum’at, 12-13 Februari 202 Tempat Kantor Wali Kota Magelang dan Lapangan Tenis Magelang	
13.	Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tentang Mitigasi Gangguan Kamtibnas pada saat Bulan Suci Ramadhan 1447 H	Kamis, 19 Februari 2026 Jam 09.30 Tempat R. Wicaksana Laghawa POLRES Kota Pekalongan	

Pekalongan, 25 Februari 2026

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN



ISKANDARM, S.H., M.Hum.
NIP. 19690525 199003 1 005